

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

1. Sumber Daya Manusia
 - a. Bagaimana cara dari TKPK Kabupaten Bantul mengembangkan sumber daya manusianya ?
 - b. Terkait dengan pelatihan, apa saja yang diberikan kepada internal TKPK terkait dengan pelatihan yang mendukung tugas TKPK ?
 - c. Bagaimana perbedaan sebelum dilakukan pelatihan dan sesudah dilakukan pelatihan ?
 - d. Apa saja faktor pendukung dari pengembangan sumber daya manusia ?
 - e. Apa saja faktor penghambat dari pengembangan sumber daya manusia ?
 - f. Apa yang akan dilakukan jika ada kendala dalam pengembangan sumber daya manusia ?
2. Prosedur
 - a. Bagaimana prosedur penanganan kemiskinan dari TKPK Kabupaten Bantul ?
 - b. Bagaimana alur koordinasi dalam penanganan dari TKPK ?
 - c. Siapa saja yang terlibat dalam prosedur penanganan kemiskinan ?
 - d. Apakah sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan prosedur penanganan kemiskinan ?
3. Sistem
 - a. Apa saja rencana strategis dari TKPK dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul ?

- b. Apa visi misi dari TKPK Kabupaten Bantul ?
- c. Capain kinerja selama tahun 2015 sampai 2016 seperti apa ?



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3345 / S1 / 2017

Menunjuk Surat : Dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY Nomor : 38/A.2-VIII/XI/2017
Tanggal : 01 Nopember 2017 Perihal : Izin Penelitian

Mengingat :

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **ADITYA WIDIYANA**
P. T / Alamat : **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY Yogyakarta**
NIP/NIM/No. KTP : **3404021004960004**
Nomor Telp./HP : **085738886576**
Tema/Judul Kegiatan : **PENGUATAN KELEMBAGAAN TKPK (TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN) DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2016**
Lokasi : **BAPPEDA KAB. BANTUL**
Waktu : **02 Nopember 2017 s/d 02 Februari 2018**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 02 Nopember 2017

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian
Perencanaan dan Pengembangan u.b.
Kasubbid. Analisa Data dan Laporan
Ir. EDY PURWANTO, M.Eng.
NIP. 19640710 199703 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Bantul (sebagai laporan)
- Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bantul
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
- Yang Bersangkutan (Pemohon)

